



PERTUMBUHAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Azwar

Balai Diklat Keuangan Makassar, Indonesia ; Email : azwar.iskandar@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
29 Agustus 2016

Dinyatakan Dapat Dimuat
18 November 2016

KATA KUNCI:

Inklusif,
PEGR,
curve,
kemiskinan,
pro-poor

ABSTRAK

The purpose of this research was to measure and analyze the inclusiveness of economic growth in South Sulawesi and its determinants on 2011-2014 period. Using the annually data from Badan Pusat Statistik (BPS) and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), this research applies Social Mobility Curve Model by Anand et al (2013), Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) Model by Klasen (2010) and Panel Regression with Fixed Effect Model (CEM) to measure and analyze the inclusiveness of economic growth and its determinants. The empirical results show that the economic growth in Eastern Indonesia is not fully inclusive in agregat It can be seen from Equity Income Index (EII) indicated that the economic growth not pro poor yet. From determinant analysis, healthy index and local government expenditure partially have positive effect on index of inclusive growth. The others such as economic growth, unemployment, education and number of poor people have negative effect however.

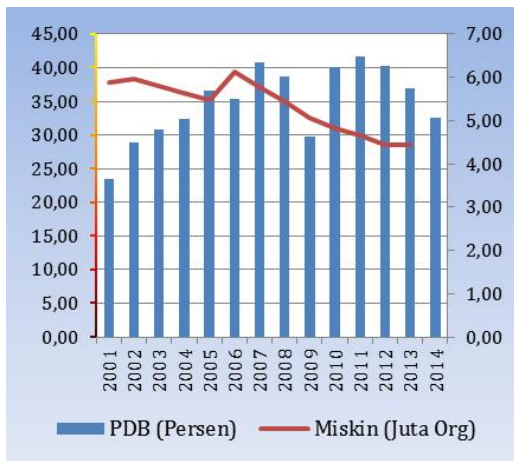
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Indeks Gini Indonesia yang relatif terus meningkat yang menandakan timpangnya pertumbuhan dan distribusi pendapatan, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan data sekunder tahunan dari publikasi Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2011-2014, penelitian ini menggunakan pendekatan Model *Social Mobility Curve* oleh Anand *et al.* (2013), Model *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR) oleh Klasen (2010) dan Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*) untuk mengukur dan menganalisis fenomena inklusifitas pertumbuhan ekonomi; serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara total (*agregat*), pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan belum inklusif secara sempurna dengan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi belum banyak berpihak kepada masyarakat miskin sebagai pertumbuhan yang *pro poor*. Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada beberapa kabupaten/kota masih timpang. Faktor kesehatan dan belanja daerah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Sementara faktor lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, dan jumlah penduduk miskin justru terbukti memiliki pengaruh yang negatif.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

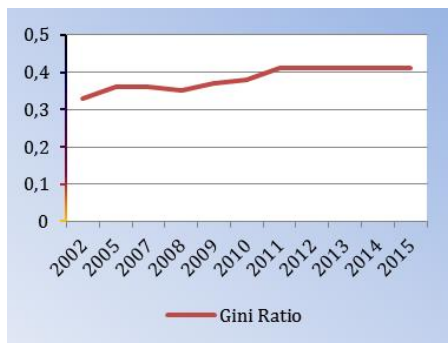
Tahun 2015 yang telah berlalu merupakan gerbang bagi jalan panjang yang sangat penting untuk melihat pencapaian dari masing-masing daerah di Indonesia dalam rangka pencaanaan program *Millennium Development Goals*. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim dengan menyediakan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi (*United Nations*, 2015). *Asian Development Bank* (ADB) mencanangkan pentingnya kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh semua komponen dalam masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pencapaiannya (ADB, 2010).

Perekonomian Indonesia relatif terus tumbuh dengan baik selama lebih dari satu dekade terakhir dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tahunan mencapai 5,06% pada tahun 2014. Pencapaian ini juga didukung oleh tren penurunan persentase masyarakat miskin sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2016).



Grafik 1. PDB dan Jumlah Penduduk Miskin
Sumber : BPS, 2016

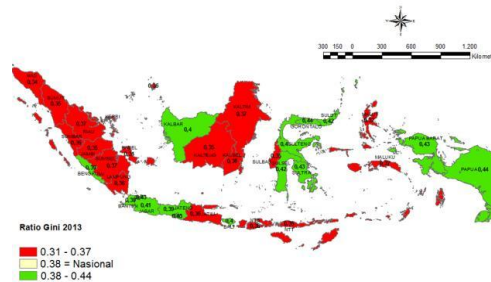
Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan pada kawasan ini adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sementara itu, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Sebagai akibatnya, koefisien *Gini Ratio*⁶ Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2002 sebesar 0,33 menjadi 0,408 pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2016).



Grafik 2. *Gini Ratio* Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jika dilihat dari sebaran *Gini Ratio* pada seluruh provinsi di Indonesia, pada tahun 2013 (Gambar 1)

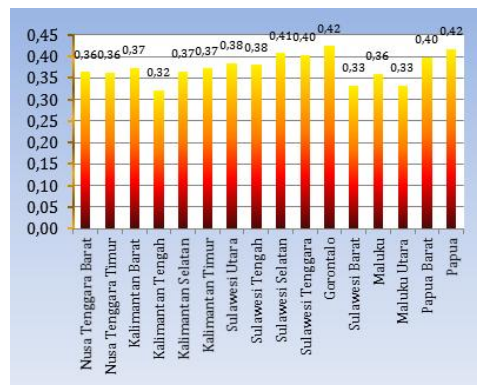
distribusi pendapatan relatif merata di provinsi-provinsi di pulau Sumatra dan sebagian besar pulau Kalimantan. Sedangkan, provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi dan Papua, distribusi pendapatannya relatif timpang. Provinsi-provinsi dengan nilai *Gini Ratio* di atas *Gini Ratio* rata-rata nasional di antaranya : Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat,



Gambar 1. Sebaran *Gini Ratio* Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Sumber : Kemendagri RI, 2016

Khusus untuk provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia⁷ ini, *Gini Ratio* rata-rata lima tahun terakhir (2009-2013) pada provinsi Sulawesi Selatan menjadi tertinggi kedua (0,41) setelah provinsi Gorontalo dan Papua yang memiliki *Gini Ratio* yang sama (0,42) (lihat Grafik 2).



Grafik 1. *Gini Ratio* Provinsi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2009-2013

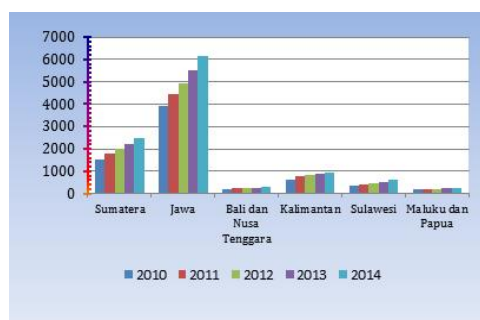
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antarprovinsi juga semakin besar. Dengan begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan, permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan khususnya antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia⁸ telah muncul sejak lama. Pembangunan yang didominasi pada provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kawasan Barat Indonesia,

⁶ *Gini Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, *Gini Ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. (http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/datacenter/index.php?page=indeks_gini).

⁷ Pembagian kawasan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 yaitu : (i) Kawasan Barat Indonesia terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Bali ; (ii) Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sumber : <http://www.bl.djpb.kemenkeu.go.id>.

membuat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal.



Grafik 3. PDRB Menurut Pulau
(Ribuan Miliar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi pada Kawasan Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini didukung oleh Sholihah (2014) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di Kawasan Barat Indonesia. Padahal menurut Todaro (2006), masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi lebih kepada siapa yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (inklusif). Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Klasen (2010) bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif itu berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang

mampu menurunkan jumlah kelompok yang “tidak diuntungkan” (marginal) dalam perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, keberadaan Kementerian Keuangan sebagai representasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan nasional dan bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) kekayaan negara dalam rangka menyokong pembangunan ekonomi, telah mencanangkan visinya yang baru dalam *Blueprint* Transformasi Kelembagaan Tahun 2014-2025 yaitu “akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Dalam visi yang baru tersebut, keberadaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengawal tercapainya pertumbuhan dan pembangunan yang akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia.

Meskipun bukan lagi menjadi isu yang terbilang baru, pertumbuhan inklusif selalu menjadi pembahasan yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode mengukur pertumbuhan inklusif. Namun, kajian dan referensi yang berfokus pada analisis pengukuran dan determinan inklusi pertumbuhan ekonomi, masih terbatas pada *scope* nasional yang relatif cukup besar dan luas. Kajian inklusifitas pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional (daerah) dirasakan masih sangat minim dan menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam *case* ini menjadi kurang optimal. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan wawasan tentang dinamika ini menjadi terbatas, sehingga seyogyanya menjadi agenda yang sangat penting untuk diprioritaskan.

Untuk menjembatani *gap* tersebut di atas, penelitian ini mencoba menganalisis inklusifitas pertumbuhan ekonomi di tingkat regional (daerah) khususnya pada kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, dimana mengambil data pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan⁹ sebagai studi kasus untuk mewakili kawasan ini. Atas dasar itu pula, penelitian ini menjadi berbeda dan terbaru dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih melihat dan mengkaji pertumbuhan inklusif dalam skala nasional. Penelitian-penelitian terdahulu terkait topik ini seperti yang dilakukan oleh Ali dan Son (2007), Habito (2009), Klasen (2010), Anand *et al.* (2013) dan Sholihah (2014), seluruhnya menggunakan *scope* nasional. Sementara, penelitian ini menggunakan cakupan yang lebih kecil yaitu pada tingkat regional, sehingga penelitian ini menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terkait inklusifitas

⁹ Penelitian ini memilih Provinsi Sulawesi Selatan karena dua alasan : (i) capaian Indeks Gini provinsi yang relatif tinggi (tertinggi kedua) di Kawasan Indonesia Timur; (ii) ketersediaan data yang relatif lebih lengkap dibanding data pada provinsi lainnya secara komprehensif (keseluruhan) terkait dengan model dana analisis penelitian.

pertumbuhan di tingkat regional atau daerah menjadi penting untuk banyak dilakukan mengingat bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan pembangunan yang berbeda pula.

Selanjutnya, untuk mencari tahu apa yang ada di balik pertumbuhan inklusif dan bagaimana cara mencapainya, maka dibutuhkan studi tersendiri yang dimulai dengan melihat faktor yang dapat mempengaruhi komponen pertumbuhan inklusif tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah, jumlah penduduk miskin dan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan ekonomi dan keuangan inklusif yang berbasis pada bukti dan temuan empiris.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena inklusifitas pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor yang dipilih (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin) terhadap pertumbuhan inklusif di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengukur dan menganalisis secara empiris fenomena inklusifitas pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Menganalisis secara empiris pengaruh faktor-faktor yang dipilih (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin) terhadap pertumbuhan inklusif di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. KERANGKA TEORITIS DAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pertumbuhan Inklusif

Seruan untuk mendorong pertumbuhan inklusif di Asia telah muncul sejak pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan (Klasen, 2010). Pertumbuhan dengan kesenjangan yang terus berlangsung dalam sebuah negara dapat menyebabkan kegaduhan sosial dan politik serta mendorong terjadinya tindak kriminal dari kelompok masyarakat yang merasa haknya (untuk hidup layak) tercabut (ADB, 2011). Fakta ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidaklah cukup untuk memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep inklusifitas kemudian muncul sebagai kebijakan utama untuk terus didorong dan memasukkan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Terdapat berbagai indikator mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang telah dirumuskan dan didefinisikan oleh beberapa organisasi internasional. Masing-masing institusi tersebut merumuskan berbagai indikator yang berbeda-beda. Bank Dunia (2008), misalnya, sangat menekankan pada kebijakan industri padat tenaga kerja dibandingkan pada distribusi pendapatan. Membangun iklim kondusif yang mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan produktifitas diasumsikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pendapatan bagi tenaga kerja sebagai aset yang penting bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mendorong pertumbuhan *pro-poor* yang dapat memberikan dampak non-pendapatan (kesehatan, pendidikan, dan sebagainya) demi kesejahteraan masyarakat miskin. *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Suryanarayana (2007) memberikan definisi mengenai pertumbuhan inklusif berdasarkan sisi produksi dan pendapatan *Gross Domestic Product* (GDP), yaitu proses dan hasil pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Dengan demikian pertumbuhan inklusif akan merepresentasikan pemerataan.

Definisi lain disajikan oleh ADB melalui Strategi 2020-nya yang mengidentifikasi pertumbuhan inklusif ke dalam dua fokus strategi yaitu *sustainable income growth* (pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan) dan kesempatan yang terbuka bagi semua pihak (Klasen, 2010). Rusastra (2011) dalam analisisnya mengemukakan paradigma pertumbuhan inklusif pada dasarnya adalah : (1) pembangunan pro kelompok miskin; (2) laju pertumbuhan ekonomi; dan (3) mencegah kerusakan lingkungan. Terdapat keterkaitan kuat antar ketiganya. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perbaikan distribusi pendapatan, yang memiliki ketergantungan pada efisiensi dan konservasi penggunaan sumber daya. Konsekuensinya, pilihan prioritas sektoral adalah pembangunan pertanian berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Pengertian pertumbuhan inklusif yang secara khusus berhubungan dekat dengan konsep kemiskinan didukung oleh Habito (2009). Menurut kesimpulannya, pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan GDP yang dapat menurunkan kemiskinan. Habito juga menjelaskan bahwa struktur

perekonomian dan komposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi telah diyakini sebagai faktor penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif, dengan pernyataan umum bahwa pertumbuhan yang lebih kuat pada struktur pertanian akan mempercepat penurunan kemiskinan. Penekanan pada sektor pertanian ini wajar bila mengingat bahwa peran sektor pertanian terutama dalam penyerapan tenaga kerja di negara berkembang sangat besar. Selain fokus akan kondisi sektor perekonomian, Habito memandang investasi pada fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif.

Min Tang (2008) memberikan perhatian terhadap persoalan kemiskinan dalam kaitannya dengan pertumbuhan inklusif dengan berangkat dari persoalan distribusi pendapatan. Ia mengamati bahwa selama beberapa dekade, banyak negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Sementara itu, distribusi pendapatan semakin memburuk dengan derajat yang berbeda-beda antarnegara. Beragam ukuran dan elemen dinyatakan turut memengaruhi apakah pertumbuhan dapat dikatakan inklusif. Ukuran yang paling penting adalah apakah pertumbuhan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan orang miskin. Orang miskin, yang merupakan pihak dengan posisi paling tidak menguntungkan dalam pembangunan, memiliki kesulitan untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Karena itu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan prioritas utama dalam agenda pertumbuhan ekonomi, tetapi terbukti sangat sulit untuk dicapai. Pertumbuhan inklusif sangat sering disamakan dengan inklusifitas *pro poor*, dengan demikian pertumbuhan yang tidak *pro poor* sudah pasti tidak inklusif.

Persoalan ketimpangan tidak luput menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pertumbuhan inklusif. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif yang fokus pada percepatan perluasan kesempatan dan akses terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk kelompok yang kurang diuntungkan, adalah syarat penting tetapi belum cukup untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah meningkat, tetapi hal ini bukan berarti bahwa orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin. Melainkan kekayaan orang kaya meningkat jauh lebih cepat dari pada orang miskin. Dengan melihat pada persoalan ketimpangan yang terjadi, Ali memberi kesimpulan bahwa faktor kunci yang bertanggungjawab atas peningkatan ketimpangan terlihat beragam dalam pertumbuhan. Tiga dimensi dalam perbedaan pertumbuhan terutama berkenaan dengan perbedaan pengukuran ketimpangan di berbagai bagian daerah. Yang pertama, pertumbuhan telah berbeda antardaerah di suatu negara (misalnya pada tingkat regional). Kedua, pertumbuhan berbeda antarkota dan desa. Ketiga, pertumbuhan berbeda antarrumah

tangga, sehingga pendapatan masyarakat kelas atas tumbuh lebih cepat dari pada masyarakat kelas menengah atau di bawahnya.

Faktor-faktor seperti ketimpangan, kemiskinan, masalah sektoral dan tenaga kerja seringkali disebutkan dalam uraian mengenai berbagai konsep pertumbuhan inklusif. Ianchovichina dan Lundstrom (2009) memberikan pendapat yang sedikit berbeda, dimana keduanya memperhatikan kembali persoalan ukuran pertumbuhan. Ianchovichina dan Lundstrom menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif berkaitan dengan memperbesar ukuran perekonomian dan bukan hanya fokus pada masalah distribusi sumber daya.

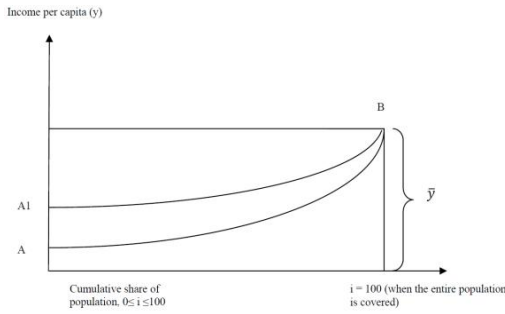
Definisi pertumbuhan inklusif yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari beragam konsep yang telah diuraikan sebelumnya oleh Ali dan Son (2007), Min Tang (2008), Habito (2009) dan Ianchovichina dan Lundstrom (2009). Terminologi pertumbuhan inklusif yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, analisis terkait faktor-faktor yang memengaruhinya akan menggunakan pendekatan indikator tersebut.

2.2. Pengukuran Pertumbuhan Inklusif

Berkeenan dengan pertumbuhan inklusif, penelitian empiris telah mengembangkan aspek kajiannya untuk membahas pengukuran indikator pertumbuhan inklusif, seperti yang dilakukan oleh Ali dan Son (2007) dan Klasen (2010).

2.2.1. Sosial Mobility Curve

Anand *et al.* (2013) menggunakan pengukuran pertumbuhan inklusif dengan pendekatan *Social Mobility Curve*, dimana tingkat keinklusan pertumbuhan ekonomi tergantung dari dua faktor: (i) pertumbuhan pendapatan; (ii) distribusi pendapatan. Pengukuran ini awalnya dikemukakan oleh Ali dan Son (2007), dengan menerapkan *Social Mobility Curve* dalam hal kesetaraan mengakses pendidikan dan kesehatan. Kemudian pengukuran tersebut digunakan Anand *et al.* (2013) yang diterapkan ke dalam sisi pendapatan. Bentuk *Social Mobility Curve* dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 1. *Social Mobility Curve*
Sumber: Anand et al (2013)

Gambar 2.1 menunjukkan semakin tinggi kurva berimplikasi pada keinklusan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan akan inklusif secara sempurna jika *Social Mobility Curve* bergerak ke atas. Jika \bar{y} adalah rata-rata pendapatan 100 persen dari populasi, maka \bar{y}_i adalah rata-rata pendapatan di bawah i persen dari populasi. Sehingga apabila \bar{y}_i untuk nilai i yang berbeda adalah sama maka jumlah \bar{y}_i akan sama dengan \bar{y} , atau dengan kata lain distribusi pendapatan *equal*. Gambar 2.1 menunjukkan kurva AIB lebih inklusif jika dibandingkan AB. Sehingga tingkat keinklusan tergantung pada perubahan rata-rata pendapatan dan perubahan distribusi pendapatan.

Untuk menangkap perubahan distribusi pendapatan dapat dihitung *Social Mobility Index* dari daerah di bawah *Social Mobily Curve*, sebagai berikut:

$$\bar{y}^* = \int_0^{100} y_i d_i \quad (2.1)$$

Jika pendapatan setiap orang pada suatu populasi itu sama, maka nilai \bar{y}^* akan sama dengan \bar{y} . Jika \bar{y}^* lebih kecil daripada \bar{y} , maka distribusi pendapatan tidak merata atau berjalan secara timpang. Makin besar nilai \bar{y}^* , maka makin besar rata-rata pendapatan yang ada. Ali dan Son (2007) mengajukan indeks kesetaraan pendapatan yang dapat diketahui dari *Income Equity Index* (IEI) dengan persamaan sebagai berikut :

$$\omega = \frac{\bar{y}^*}{\bar{y}} \quad (2.2)$$

Jika terjadi kesetaraan secara sempurna maka $\omega=1$, semakin mendekati angka 1 menunjukkan distribusi pendapatan semakin *equal* atau sama, hal ini bertolak belakang dengan gini koefisien. Sehingga untuk memperoleh distribusi yang pendapatan yang merata atau tidak timpang, maka nilai IEI yang dinotasikan dengan ω harus bernilai lebih dari 1 ($\omega>1$). Sementara $\omega<1$, menunjukkan kesempatan/peleuang yang ada semakin tidak merata (Ali dan Son, 2007). Maka dari persamaan 2.2 di atas diperoleh persamaan 2.3 yaitu :

$$\bar{y}^* = \omega^* \bar{y} \quad (2.3)$$

Dari persamaan di atas terlihat bahwa untuk meningkatkan nilai \bar{y}^* maka diperlukan: (i) peningkatan \bar{y} , misalnya peningkatan rata-rata pendapatan melalui pertumbuhan; (ii) peningkatan ω^* atau *equity index of income* melalui peningkatan kesetaraan atau; (iii) kombinasi (i) dan (ii). Diferensiasi rumus di atas sebagai berikut:

$$d\bar{y}^* = \omega^* d\bar{y} + d\omega^* \bar{y} \quad (2.4)$$

Di mana $d\bar{y}^*$ adalah perubahan tingkat keinklusan pertumbuhan. Pertumbuhan akan inklusif jika nilai $d\bar{y}^*>0$. Dari persamaan 2.4 pertumbuhan dan kesetaraan terintegrasi dalam perhitungan/pengukuran pertumbuhan inklusif.

Persamaan 2.4 di atas juga dapat ditulis :

$$\frac{d\bar{y}^*}{\bar{y}^*} = \frac{d\bar{y}}{\bar{y}} + \frac{d\omega}{\omega} \quad (2.5)$$

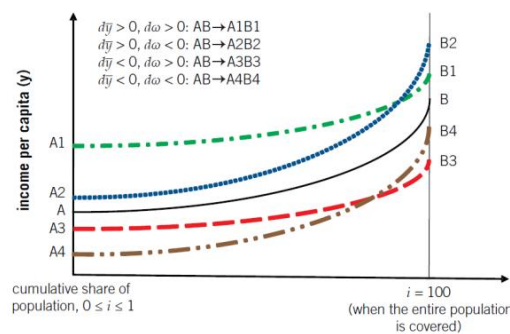
dimana:

$$\frac{d\bar{y}^*}{\bar{y}^*} = \text{inclusive growth}$$

$\frac{d\bar{y}}{\bar{y}}$: persentase perubahan *average income*.

$\frac{d\omega}{\omega}$: persentase perubahan *equity index of income*.

Adapun pergeseran *sosial mobility curve* sebagai akibat dari perubahan indeks kesetaraan pendapatan ataupun peningkatan rata-rata pendapatan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pergeseran *Social Mobility Curve*
Sumber : Anand et al (2013)

Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan akan inklusif garis *sosial mobility curve*. Fenomena pertumbuhan inklusif dapat dilihat dari bentuk dan arah pergeserannya. Jika garis kurva semakin landai maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya jika semakin curam menunjukkan distribusi pendapatan

semakin timpang. Garis kurva bergeser ke atas menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan, apabila bergeser ke bawah menunjukkan penurunan pendapatan. Untuk memudahkan menentukan keinklusan dan ketidakinklusan pertumbuhan ekonomi bisa dilihat pada matrik keinklusan pada Tabel 1.

Tabel 1
Matriks Keinklusan

Kuadran	$d\bar{y}$	$d\omega$	Keterangan
I	$d\bar{y} > 0$	$d\omega > 0$	Inklusif secara tidak ambigu
II	$d\bar{y} > 0$	$d\omega < 0$	Pendapatan per kapita tinggi, ketimpangan menjadi korban. Akan inklusif jika persentase perubahan $\bar{y} >$ persentase perubahan ω
III	$d\bar{y} < 0$	$d\omega > 0$	Distribusi tercapai, tetapi pendapatan rata-rata menjadi korban. Akan inklusif jika persentase perubahan $\omega >$ persentase perubahan \bar{y}
IV	$d\bar{y} < 0$	$d\omega < 0$	Tidak inklusif secara tidak ambigu

Sumber: Anand *et al* (2013)

2.2.2. Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)

Alternatif lain untuk mengukur pertumbuhan inklusif dirumuskan oleh Klasen (2010). Menurutnya, pendekatan yang sederhana untuk memeriksa pertumbuhan yang inklusif diperlukan. Dalam merumuskan metode pengukuran untuk pertumbuhan inklusif, Klasen mengadaptasi metode dari penelitian-penelitian *pro-poor growth*. Secara khusus, adaptasi dilakukan dari penelitian Kakwani dan Son (2008) mengenai konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)* yang mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan untuk kelompokkurang beruntung.

Manfaat pertumbuhan bisa dihitung dengan menggunakan metode PEGR yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin. Dalam penghitungan PEGR sendiri, terdapat 2 metode, yaitu dengan menggunakan teknik analisis secara *ex-ante* dan *Post-ante*.

Metode penghitungan PEGR dengan menggunakan teknik analisis secara *ex-ante* diterapkan berdasarkan asumsi bahwa perubahan ketidakmerataan pendapatan hanya berlangsung dengan cara terjadi pergeseran secara proporsional dan konstan di semua titik pada kurva Lorenz. Padahal pergeseran kurva Lorenz dapat disebabkan banyak hal, sehingga metode penghitungan PEGR secara *ex-ante* ini tidak mungkin untuk dilakukan.

Metode penghitungan PEGR dengan menggunakan teknik analisis *ex-post* dilakukan untuk mengatasi permasalahan penghitungan secara *ex-ante*, yaitu dengan cara membandingkan keadaan kemiskinan, distribusi pendapatan (kurva Lorenz) dan rata-rata pendapatan penduduk pada awal periode dengan keadaan pada akhir periode. Misalkan ukuran kemiskinan merupakan fungsi dari garis kemiskinan z , rata-rata pendapatan μ , dan kurva Lorenz $L(p)$, yang dituliskan sebagai berikut :

$$P = P(z, \mu, L(p)) \quad (2.6)$$

Jika ukuran kemiskinan yang digunakan adalah :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad (2.7)$$

$\alpha = 0, 1, 2$ dan y_i = pendapatan penduduk ke- i dan q = jumlah penduduk miskin. Maka perubahan persentase penduduk miskin pada periode 1 dan periode 2 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$P_{12} = P_2 - P_1 = Ln [P(z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_1(p))] \quad (2.8)$$

Nilai P_{12} ini masih mengandung komponen pertumbuhan dan komponen distribusi. Misalkan μ_1 dan μ_2 merupakan rata-rata pendapatan penduduk pada periode 1 dan periode 2, maka pertumbuhan pendapatan penduduk (\bar{y}) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\bar{y} = Ln(\mu_2) - Ln(\mu_1) \quad (2.9)$$

Total elastisitas kemiskinan (δ) dapat didekomposisi menjadi elastisitas kemiskinan yang berkaitan dengan pertumbuhan (η) dan elastisitas kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmerataan (ζ). Persamaan untuk total elastisitas (δ) sebagai berikut:

$$\delta = \frac{[Ln [P(z, \mu_2, L_2(p))] - Ln [P(z, \mu_1, L_1(p))]]}{\bar{y}} \quad (2.10)$$

dan

$$\delta = \eta + \zeta \quad (2.11)$$

dimana elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan (η) dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{1}{2\bar{y}} [Ln (P(z, \mu_2, L_1(p))) - Ln (P(z, \mu_1, L_1(p))) + Ln (P(z, \mu_2, L_2(p))) - Ln (P(z, \mu_1, L_2(p)))] \quad (2.12)$$

dan elastisitas kemiskinan terhadap ketidakmerataan (ζ) dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{1}{2\bar{y}} [Ln (P(z, \mu_1, L_2(p))) - Ln (P(z, \mu_1, L_1(p))) + Ln (P(z, \mu_2, L_2(p))) - Ln (P(z, \mu_2, L_1(p)))] \quad (2.13)$$

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas, maka nilai PEGR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PEGR = \bar{y}^* = (\bar{\delta} / \bar{\eta}) \bar{y} \quad (2.14)$$

Nilai PEGR dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jika $\bar{y}^* = \bar{y}$ maka artinya pertumbuhan bersifat netral, setiap orang menerima manfaat yang sama secara proporsional dari pertumbuhan.
2. Jika $\bar{y}^* > \bar{y}$ berarti pertumbuhan bersifat *pro poor growth*, penduduk miskin lebih banyak menerima manfaat dari pertumbuhan.
3. Jika $0 < \bar{y}^* < \bar{y}$ berarti pertumbuhan belum bersifat *pro poor growth*, manfaat pertumbuhan lebih banyak diterima penduduk tidak miskin (ketidakmerataan meningkat) tetapi masih terjadi pengurangan kemiskinan.
4. Jika $\bar{y}^* < 0$ berarti pertumbuhan bersifat anti *pro poor growth* atau manfaat pertumbuhan yang dinikmati penduduk tidak miskin, kemiskinan meningkat.

Dengan mengadopsi uraian mengenai konsep PEGR, maka pertumbuhan inklusif dapat diukur dengan rumusan berikut :

$$IG_{ij} = \frac{E_{ij}}{E_i} * \bar{E}_j \quad (2.15)$$

dimana :

- IG_{ij} = Koefisien pertumbuhan inklusif
 E_{ij} = Pertumbuhan kelompok i dalam kaitannya dengan indikator j .
 E_j = Pertumbuhan indikator j .

Dalam hal ini i mengacu pada kelompok kurang beruntung tertentu dan j mengacu pada indikator yang bersangkutan (misalnya, kemiskinan, pertumbuhan, pendapatan pendidikan dan lainnya).

2.3. Determinan Pertumbuhan Inklusif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan inklusif seharusnya mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan inklusif juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan karena keduanya adalah indikator pembentuk pertumbuhan inklusif secara total. Untuk itu, perlu melihat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi masing-masing indikator tersebut.

Menurut Todaro (2006), masalah fundamental bagi sebuah negara bukan hanya untuk menumbuhkan PDB, tetapi siapakah yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan

adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam Mankiw (2006). Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ravallion (1996), Son dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) juga memberikan kesimpulan yang secara keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiw. Menurut Ravallion (1996), Son dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) setelah melakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat ketimpangan sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan.

Adams (2004) juga melihat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan pendapatan rata-rata. Terdapat hubungan yang kuat secara statistik antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Untuk itu Hasan dan Quibria (2002) mengatakan bahwa tidak adalagi yang meragukan pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi penurunan angka kemiskinan. Apa yang dikemukakan oleh Adams, Hasan dan Quibria dipertegas kembali oleh Siregar dan Wahyuniarti (2007). Mereka menemukan bahwa setiap pertumbuhan 1 Triliun dalam output akan menurunkan sekitar 9.000 orang miskin.

Selanjutnya menurut Sukirno (2004), kemiskinan juga dipengaruhi oleh pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi

kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Terdapat hubungan yang erat antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1999). Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Menurut Octaviani (2001), jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

Angka Indeks Kesehatan juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Arsyad (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output.

Berdasarkan teori mengenai lingkaran kemiskinan yang dikemukakan Myrdal (2000) bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan

dengan meningkatnya nilai Angka Harapan Hidup (AHH) maka produktivitas akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Menurut Todaro (2006), pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Ia juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani, 2005).

Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja untuk pengentasan

kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2005) menegaskan peranan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian tersebut menjelaskan hubungan yang negatif antara anggaran pendapatan terhadap jumlah orang miskin. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud dialokasikan guna membuat program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang ditemukan oleh Hasibuan diperkuat oleh Alawi (2006). Alawi menemukan bahwa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat memiliki korelasi yang negatif terhadap tingkat keparahan kemiskinan. Artinya semakin tinggi alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat maka akan menurunkan tingkat keparahan kemiskinan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata juga menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi dan terus meningkat yang berakibat pada sebaran distribusi pendapatan yang relatif timpang dan tidak merata, khususnya pada provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Salah satu akibatnya adalah pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal baik dalam hal prasarana fisik, sosial, sumber daya (modal dan manusia), maupun kelembagaan dibanding Kawasan Barat Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, bisa jadi tidak diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Yang ada adalah pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat memicu tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan mungkin saja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang lebih signifikan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan menggunakan data kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewakili Kawasan Timur Indonesia, penelitian ini memberikan hipotesis terkait pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia bahwa :

- H₁ : pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum inklusif secara sempurna.
- H₂ : pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif di Kawasan

Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, di antara bentuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pertumbuhan inklusif pada tingkat makro adalah dengan menjadikan sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan) lebih dioptimalkan dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Agussalim, 2012). Jika penyerapan tenaga kerja rendah yang berakibat pada meningkatnya tingkat pengangguran, maka kemiskinan pun akan bertambah, distribusi akan menjadi timpang. Dari penjelasan ini, penelitian ini memberikan hipotesis terkait hubungan pengangguran dengan pertumbuhan inklusif bahwa:

H₃ : pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bentuk pertumbuhan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan lainnya khususnya melalui program-program yang dapat menurunkan beban penduduk miskin dalam jangka pendek yang seharusnya digalakkan oleh pemerintah daerah adalah melalui program yang meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga dalam jangka waktu pendek beban biaya penduduk miskin menurun serta dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya produktivitas penduduk miskin sehingga kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penduduk miskin meningkat (Agussalim, 2012). Selain itu, pendidikan dan kesehatan yang memadai akan meningkatkan produktivitas, daya kerja dan output masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terlepas dari jerat kemiskinan. Dari penjelasan ini, penelitian ini memberikan hipotesis terkait hubungan indeks kesehatan dan angka partisipasi sekolah (pendidikan) dengan pertumbuhan inklusif bahwa:

H₄ : Indeks Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

H₅ : Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait dengan belanja pemerintah daerah, dengan menentukan sasaran pengeluaran dan belanja untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran atau belanja pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka

yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran atau belanja pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Dari penjelasan ini, penelitian ini memberikan hipotesis terkait hubungan belanja daerah dengan pertumbuhan inklusif bahwa :

H₆ : belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah penduduk miskin yang tinggi, tentu saja akan menyebabkan distribusi pendapatan akan semakin timpang yang menghambat pertumbuhan inklusif itu sendiri. Pembangunan *pro poor* seharusnya banyak ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari penjelasan ini, penelitian ini memberikan hipotesis terkait hubungan jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan inklusif bahwa :

H₇ : jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Terhadap seluruh variabel yang dimasukkan dalam model penelitian ini yaitu berupa pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin sebagai variabel-variabel independen (bebas) dalam memberikan pengaruhnya secara simultan (bersama-sama) terhadap pertumbuhan inklusif, penelitian ini memberikan hipotesis bahwa :

H₈ : Pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data, Populasi, Sampel dan Variabel Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan inklusif di Kawasan Timur Indonesia yang diwakili oleh provinsi Sulawesi Selatan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari rilis publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSESNAS) dan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terdiri dari data-data seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan berupa :

- (i) data *time series* tahunan periode 2011 sampai 2014 per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berupa data pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga, jumlah penduduk miskin dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk menganalisis fenomena pertumbuhan inklusif; dan
- (ii) data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section* berupa data data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), jumlah pengangguran, angka indeks kesehatan, angka partisipasi murni sekolah, belanja pemerintah daerah dan jumlah penduduk miskin untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif. Data *time series* yang digunakan dimulai dari 2011-2014. Sedangkan data *cross section*-nya adalah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar pada laporan institusi terkait (BPS dan DJPK) yang memuat data/informasi yang terkait dengan penelitian pada periode penelitian;
2. Kabupaten/kota telah berdiri sebelum periode penelitian.

Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel di atas, maka kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 24 kabupaten/kota.

Variabel-variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rancangan analisis penelitian yaitu :

1. Analisis pertumbuhan inklusif menggunakan : (i) variabel pendapatan yang diproksi oleh Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran; (ii) variabel jumlah penduduk miskin; (iii) variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksi oleh data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK);
2. Analisis determinan pertumbuhan inklusif menggunakan nilai indeks atau koefisien pertumbuhan inklusif sebagai variabel dependen (terikat), dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin sebagai variabel independen (bebas).

Operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Operasional Variabel Penelitian

MODEL PERTUMBUHAN INKLUSIF :		
Variabel	Deskripsi	
Pendapatan	Perdapatan rata-rat per kapita penduduk miskin pada kabupaten/kota	Diproksi oleh nilai Pengeluaran Perkapita sebulan (Rp) Menurut Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran. Sumber : Data Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah penduduk miskin (persen) pada kabupaten/kota	
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota	Diproksi oleh nilai/data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
MODEL PANEL :		
Variabel Terikat	Deskripsi	
Pertumbuhan Inklusif (IGP)	Berupa nilai Indeks Pertumbuhan Inklusif yang diperoleh dari hasil perhitungan	Koefisien Model Inklusif PEGR.
Variabel Bebas	Deskripsi	
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Tingkat pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota pada periode t	Berupa nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/kota pada periode tertentu.
Pengangguran (PGR)	Tingkat Pengangguran Daerah i pada periode t	Berupa jumlah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang tidak bekerja dan pengangguran pada kabupaten/kota pada periode tertentu. Espektasi : -
Kesehatan (KSH)	Nilai Indeks Kesehatan kabupaten/kota i pada periode t	Berupa nilai rasio indeks/tingkat kesehatan masyarakat pada kabupaten/kota pada periode tertentu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Espektasi : +
Pendidikan (PDD)	Jumlah partisipasi murni sekolah kabupaten/	Berupa persentase jumlah total partisipasi murni sekolah masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SLTP

	kota i pada periode t	dan SLTA) pada kabupaten/kota pada periode tertentu.
Belanja Daerah (BDR)	Jumlah total belanja daerah kabupaten/kota i pada periode t	Espektasi : + Berupa jumlah belanja yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung (dalam milyaran rupiah). Espektasi : +
Jumlah Penduduk Miskin (MSK)	Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota i pada periode t	Dalam persentase Espektasi : -

Sumber : BPS (2016), DJPK (2016)

3.2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dan membuktikan hipotesis penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk keperluan pengolahan data analisis, penelitian ini menggunakan *software/program Microsoft Excel 2007, PASW Statistic 18 dan Eviews 5*. Model dan teknik analisis yang digunakan dibedakan berdasarkan pertanyaan dan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Untuk menjawab pertanyaan pertama penelitian, penelitian ini menggunakan dua model analisis yaitu :
 - analisis *Social Mobilty Curve* oleh Anand *et al* (2013);
 - analisis *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR), dimana rumus pertumbuhan inklusif yang digunakan diadopsi dari model Sholihah (2014) sebagai hasil pengembangan konsep oleh Klasen (2010) dengan rumus (2.15). Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa definisi pertumbuhan inklusif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator pendekatan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan menjabarkan i dari persamaan (2.10) sebagai kemiskinan (p) yang mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi (g), maka model analisis terkait fenomena inklusifitas pertumbuhan ekonomi yang digunakan :

$$IG_p = (E_{pg} / E_p) G_g \quad (3.1)$$

dimana :

- IG_p : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan;
- E_p : elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata;
- E_{pg} : elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi;
- G_g : pertumbuhan ekonomi;

IG_p menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IG_p > G_g$.

Nilai E_{pg} dan E_p pada persamaan (3.1) di atas diperoleh dengan cara yang sama dalam konsep PEGR.

Dengan mendefinisikan kemiskinan (p) sebagai fungsi dari jumlah penduduk miskin (z) dan pendapatan rata-rata penduduk (κ) yang dituliskan sebagai berikut :

$$p = p(z, \kappa) \quad (3.2)$$

maka perubahan jumlah penduduk miskin pada periode 1 dan periode 2 dapat dihitung sebagai :

$$p_{12} = p_2 - p_1 = \text{Ln} [p(z_2, \kappa_2)] - \text{Ln} [p(z_1, \kappa_1)] \quad (3.3)$$

dan perubahan persentase pendapatan rata-rata penduduk dapat dihitung sebagai :

$$\Psi = \text{Ln} (\kappa_2) - \text{Ln} (\kappa_1) \quad (3.4)$$

Dengan demikian elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata (E_p) dapat dihitung sebagai :

$$E_p = p_{12} / \Psi \quad (3.5)$$

Sementara perubahan pertumbuhan ekonomi (G_g) yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka perubahan pertumbuhan ekonomi periode 1 dan periode 2 dapat dihitung sebagai :

$$G_g = \text{Ln} (\text{PDRB}_2) - \text{Ln} (\text{PDRB}_1) \quad (3.6)$$

Sehingga, elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (E_{pg}) dapat dihitung sebagai :

$$E_{pg} = p_{12} / G_g \quad (3.7)$$

Hasil perhitungan persamaan (3.5) dan (3.7) di atas kemudian dimasukkan ke dalam persamaan (3.1) untuk memperoleh nilai indeks pertumbuhan inklusif untuk kemudian dibandingkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi (G_g).

- Untuk menjawab pertanyaan kedua penelitian, penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Data Panel.

Analisis Regresi Data Panel adalah suatu metode regresi terhadap gabungan dari data antarwaktu (*timeseries*) dan data antarindividu (*cross section*).

Mengingat teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, maka terhadap data juga dilakukan uji normalitas dan asumsi klasik untuk memperoleh hasil estimasi regresi yang memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yakni mempunyai sifat linier, tidak bias, dan varian minimum, yaitu :

- Uji Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hal ini dilakukan karena regresi mensyaratkan distribusi *error* yang normal, artinya nilai *error* terdistribusi secara simetris di sekitar *mean* (Ghazali, 2005).

Dalam aplikasi *Eviews*, uji normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) dan nilai *Chi Square* tabel. Uji *Jarque-Bera* (JB) dapat diperoleh dari histogram *normality*. Hipotesis dalam uji normalitas yang digunakan dengan α (10%) adalah :

- H_0 : Data berdistribusi normal
 H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari *Jarque-Bera* (JB) hitung $>$ *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak. Jika hasil dari *Jarque-Bera* (JB) hitung $<$ *Chi Square* tabel, maka H_0 diterima.

- Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Manurung (2005) menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Metode

formal untuk mendeksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan *Park Test*, *Glejser Test*, *Spearman's Rank Correlation Test*, *Golfeld-Quandt Test*, *Breusch-Pagan-Godfrey Test*, *White's General Heteroscedasticity Test*, dan *Koenker-Basset Test*.

(iii) Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series (Gujarati, 2003).

Uji Durbin Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual (*prediction errors*) dari sebuah analisis regresi. Pada saat melakukan uji autokorelasi, kita menggunakan tabel Durbin Watson. Tabel tersebut menjadi alat pembanding terhadap nilai Durbin Watson hitung. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut :

1. Jika $d < d_l$, berarti terdapat autokorelasi positif;
2. Jika $d > (4 - d_l)$, berarti terdapat autokorelasi negative;
3. Jika $d_u < d < (4 - d_l)$, berarti tidak terdapat autokorelasi;
4. Jika $d_l < d < d_u$ atau $(4 - d_u)$, berarti tidak dapat disimpulkan;

di mana : d_L adalah batas bawah Durbin Watson dan d_U adalah batas atas Durbin Watson.

Heterokedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model (Kuncoro, 2011). Gejala ini sering terjadi pada data *cross section* (Gujarati, 2012), sehingga sangat dimungkinkan terjadi heterokedastisitas pada data panel. Implikasi terjadi autokorelasi dan heterokedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan model *Cross-section SUR*. Apabila model data panel mengalami heterokedastisitas tanpa autokorelasi dapat diatasi dengan model *Cross-section Weight*.

(iv) Uji Multikolinearitas.

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu

model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Persamaan regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika tingkat korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,95 (Ghazali, 2005).

Setelah uji asumsi klasik untuk regresi berganda terpenuhi, maka untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu :

1. Model *Common Effect*

Teknik ini sama pada analisis data *cross section* dan *time series* karena mengasumsikan bahwa koefisien *intercept* dan *slopenya* sama (konstan) untuk setiap data *cross section* dan *time series*. Dengan kata lain model ini tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu. Namun, untuk melakukan regresinya perlu menggabungkan data *cross section* dan *time series* yang biasa disebut *pool data*.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Teknik Model Efek Tetap (*Fixed Effect*) sudah memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Pada model ini efek dimensi individu dan waktu terletak pada *intercept* dan *slope* pada model. Sehingga pada model ini menganggap bahwa yang sangat mempengaruhi variabel dependen adalah *slope* dan *intercept*.

3. Model Efek Random (*Random Effect*)

Teknik ketiga ini hampir sama dengan *Model Fixed Effect* karena memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Namun model ini beranggapan bahwa efek dimensi tersebut terletak pada *error* dari model.

Menurut Winarno (2007), langkah-langkah pengujian pemilihan model data panel secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Estimasi dengan *Fixed Effect*
2. Uji Chow (untuk menentukan model yang digunakan apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect*). Jika H_0 diterima (jika nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* > 0,05), maka yang dipilih adalah model *Common Effect* (selesai sampai disini). Jika H_0 ditolak (jika nilai *Prob Cross Section F* dan *Chi Square* < 0,05), maka yang dipilih adalah model *Fixed Effect* (lanjut ke langkah 3).
3. Estimasi dengan *Random Effect*
4. Uji Hausman (untuk menentukan model yang digunakan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect*). Jika H_0 diterima (jika nilai probabilitas *cross-section random* > dari

0,05), maka dipilih model *Random Effect*. Jika H_0 ditolak (jika nilai probabilitas *cross-section random* < dari 0,05), maka dipilih model *Fixed Effect*.

Sesuai dengan variabel dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan model empiris regresi data panel sesuai pendekatan indikator pertumbuhan inklusif (hasil analisis PEGR) yaitu sebagai berikut :

$$IGP_{pit} = \alpha_1 PDRB + \alpha_2 PGR_{it} + \alpha_3 KSH_{it} + \alpha_4 PDD_{it} + \alpha_5 BDR_{it} + \alpha_6 MSK_{it} + \varepsilon$$

dimana :

- IGP_{pit} : Koefisien atau indeks pertumbuhan inklusif untuk kemiskinan di kabupaten/kota i pada waktu t
- $PDRB_{it}$: Pertumbuhan ekonomi (PDRB) kabupaten/kota i pada waktu t
- PGR_{it} : Jumlah pengangguran di kabupaten/kota i pada waktu t
- KSH_{it} : Indeks kesehatan di kabupaten/kota i pada waktu t
- PDD_{it} : Pendidikan di kabupaten/kota i pada waktu t
- BDR_{it} : Belanja Daerah di kabupaten/kota i pada waktu t
- MSK_{it} : Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota i pada waktu t
- $\alpha_{1,2,3,4,5,6}$: Koefisien regresi faktor 1,2,3,4,5 dan 6
- ε : Error

3.3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, dilakukan uji sebagai berikut :

1. Uji statistik t (Secara Parsial).

Menurut Ghazali (2005) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- Jika nilai signifikan ($Prob$) > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan ($Prob$) \leq 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Statistik F (Secara Simultan).

Menurut Ghazali (2005) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dimana H_a diterima apabila $Prob(F\text{-statistic}) < \alpha$ dan H_a ditolak apabila $Prob(F\text{-statistic}) > \alpha$. Dalam hal ini $\alpha = 0,05$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Pertumbuhan Inklusif

Konsep pertumbuhan inklusif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari beragam konsep yang telah diuraikan sebelumnya oleh Ali (2007), Min Tang (2008), Habito (2009) dan Ianchovichina dan Lundstrom (2009). Terminologi pertumbuhan ekonomi disebut inklusif dalam penelitian ini adalah apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, analisis terkait inklusifitas pertumbuhan menggunakan pendekatan indikator-indikator tersebut yang kemudian dituangkan dalam model *Social Mobility Curve* dan *Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)*.

Hasil analisis dari masing-masing model tersebut, diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Hasil Analisis Model *Social Mobility Curve*

Pengukuran pertumbuhan inklusif dengan pendekatan *Social Mobility Curve* menggunakan dua faktor : (i) pertumbuhan pendapatan; (ii) distribusi pendapatan, sehingga tingkat keinklusiannya tergantung pada perubahan rata-rata pendapatan dan perubahan distribusi pendapatan.

Pada penelitian ini *Model Social Mobility Curve* provinsi Sulawesi Selatan dibuat dalam periode 4 tahun. Hasil perhitungan dengan pendekatan model ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

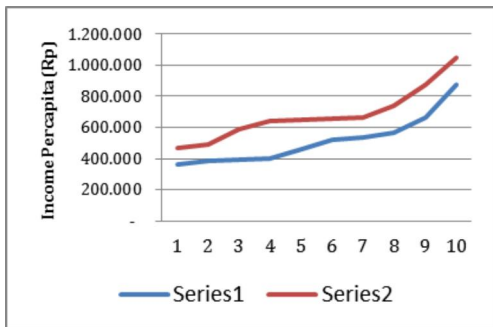
Tabel 3
Income Index Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2014

Percentile	2011	2014
10 th	364,707	469,359.00
20 th	382,385	493,192,40

30 th	395,217	586,825.20
40 th	402,083	643,394.80
50 th	464,120	647,023.50
60 th	523,103	654,727.00
70 th	534,625	662,231.80
80 th	567,989	736,536.60
90 th	665,774	876,287.10
100 th	872,203	1,050,725.00
Income Index	517,220.50	682,030.24
Equity Income Index	0.59	0.65

Sumber : hasil olah data

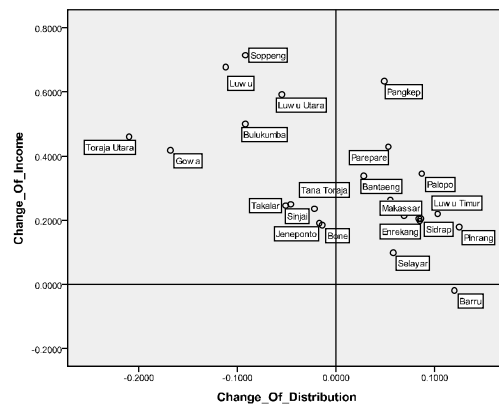
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan secara total di Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif yang sempurna. Dari indikator distribusi pendapatan yang berdampak pada ketimpangan, Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif. Hal ini terlihat dari nilai *Equity Income Index* (ω) pada periode penelitian yaitu sebesar 0.59 pada tahun 2011 dan 0.65 pada tahun 2014 masih bernilai lebih kecil dari 1. Nilai ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum banyak berpihak kepada masyarakat miskin sebagai pertumbuhan yang *pro poor*.



Grafik 4. *Social Mobility Curve*
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2014
Sumber : BPS (2016), data diolah

Meskipun demikian, dari indikator pedapatan, pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan relatif telah mencapai pertumbuhan yang inklusif. Hal ini terlihat dari nilai *Income Index* yang meningkat dari tahun 2011 (Series1) hingga 2014 (Series2) yang diilustrasikan dari kurva *Social Mobility* yang bergeser ke atas dengan model yang sedikit curam. Artinya, meskipun pendapatan meningkat, distribusi pendapatan relatif masih timpang sebagaimana hasil *Equity Income Index* di atas.

Hasil analisis *Social Mobility Curve* untuk tingkat kabupaten/kota dari tahun 2011 sampai 2014 dengan memperhatikan perubahan tingkat keinklusan pertumbuhan ($d\bar{y}^*$) yang terintegrasi dari difrensiasi pertumbuhan rata-rata pendapatan ($d\bar{y}$) dan distribusi pendapatan ($d\omega$) berdasarkan Matriks Inklusifitas, dapat dilihat pada Grafik plot berikut :



Grafik 5. Matriks Inklusifitas
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2011-2014

Sumber : BPS (2016), data diolah

Grafik 5 menunjukkan peta distribusi inklusifitas pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan. Hasilnya menunjukkan adanya tren yang menurun pada beberapa kabupaten/kota, yang bermakna terhadap *trade-off* antara nilai $d\bar{y}$ dan $d\omega$. Pada periode awal nilainya positif, kemudian pada periode kedua nilainya negatif, dan begitu sebaliknya. Terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran pertama (I), yaitu Bantaeng, Enrekang, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Selayar, Sidrap dan Wajo. Kabupaten/kota dalam kuadran ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang inklusif secara tidak ambigu. Terdapat 11 kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran kedua (II), yaitu Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja dan Toraja Utara. Daerah-daerah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan positif dari pendapatan rata-rata per kapita rumah tangga namun mengorbankan distribusi pendapatan. Tanda $d\omega < 0$ berarti bahwa kesempatan (pendapatan) yang ada telah dimanfaatkan dan pemanfaatan ini terus meningkat oleh populasi, dari keluarga yang kaya hingga keluarga yang miskin sekalipun. Sementara itu, kabupaten Barru menjadi satu-satunya kabupaten yang masuk dalam kuadran III yang berarti bahwa distribusi pendapatan pada kabupaten tersebut telah tercapai, tetapi pendapatan rata-rata menjadi korban.

Tabel 4
Perubahan Pendapatan dan Distribusi
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2011-2014

Kabupaten	Change of Income	Change of Distribution	Kuadran Inklusifitas
Bantaeng	0.338	0.028	I
Barru	-0.019	0.120	III
Bone	0.185	-0.014	II
Bulukumba	0.500	-0.092	II
Enrekang	0.198	0.085	I
Gowa	0.418	-0.168	II

PERTUMBUHAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

Azwar

Jeneponto	0.191	-0.017	II
Luwu	0.677	-0.112	II
Luwu Timur	0.220	0.103	I
Luwu Utara	0.592	-0.055	II
Makassar	0.205	0.084	I
Maros	0.264	0.055	I
Palopo	0.345	0.087	I
Pangkep	0.633	0.049	I
Parepare	0.429	0.053	I
Pinrang	0.179	0.125	I
Selayar	0.099	0.058	I
Sidrap	0.205	0.086	I
Sinjai	0.250	-0.046	II
Soppeng	0.714	-0.092	II
Takalar	0.246	-0.051	II
Tana Toraja	0.236	-0.022	II
Toraja Utara	0.460	-0.210	II
Wajo	0.215	0.069	I

Sumber : BPS (2016), data diolah

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa beberapa kabupaten/kota telah mampu meningkatkan pendapatan rata-rata per kapita rumah tangganya, namun di sisi lain distribusi pendapatan di antara masyarakat masih terdapat ketimpangan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya berjalan secara inklusif.

4.1.2. Hasil Analisis Model PEGR

Pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang dapat menurunkan kemiskinan atau memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan orang miskin. Orang miskin, yang merupakan pihak dengan posisi paling tidak menguntungkan dalam pembangunan, memiliki kesulitan untuk memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Pertumbuhan inklusif sangat sering disamakan dengan inklusifitas *pro poor*, sehingga pertumbuhan yang tidak *pro poor* digolongkan sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif.

Dalam penelitian ini, inklusifitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan dinilai dengan koefisien inklusifitas untuk kemiskinan (IGp). Tabel 4 menunjukkan perbandingan koefisien inklusifitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dari perubahan PDRB dari 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014.

Pertumbuhan ekonomi dikatakan inklusif apabila koefisien inklusifitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (IGp) memiliki nilai yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi (Gg) atau $IGp > Gg$. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa sepanjang periode pengamatan tahun 2011-2014, tidak satupun kabupaten/kota yang konsisten memiliki pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan.

Tabel 5 menunjukkan bahwa koefisien inklusifitas yang dimiliki setiap provinsi cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 sebanyak 50% atau 12

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, yaitu Bantaeng, Barru, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap dan Wajo. Pada tahun 2012, jumlah kabupaten/kota yang menunjukkan adanya pertumbuhan inklusif menurun menjadi 37,5% atau 9 kabupaten/kota, yaitu Bantaeng, Luwu, Luwu Utara, Makassar, Pangkep, Soppeng, Takalar, Tana Toraja dan Wajo. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2013, kabupaten/kota Bulukumba, Enrekang, Maros, Palopo dan Pangkep adalah kabupaten-kabupaten yang memiliki pertumbuhan inklusif terhadap menurunkan kemiskinan, dimana jumlah ini adalah yang paling rendah dalam periode penelitian yaitu hanya 5 kabupaten/kota (20,83%).

Yang menarik dalam penelitian adalah, memasuki tahun berikutnya yaitu tahun 2014, sebanyak 83,33% atau 20 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan mencapai pertumbuhan inklusif. Hanya 16,67% atau kabupaten/kota saja yang pertumbuhannya belum mencapai derajat inklusif, yaitu Barru, Enrekang, Makassar dan Pangkep. Dalam seluruh periode penelitian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang relatif baik dan mampu mempertahankan kualitas pertumbuhannya dalam derajat inklusif. Kabupaten Bantaeng, Luwu Utara dan Wajo adalah diantara kabupaten/kota yang tergolong baik dalam menjaga kualitas pertumbuhan, yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2014. Begitupula kabupaten Maros yang mampu menjaga pertumbuhannya pada tahun 2011, 2013 dan 2014.

Tabel 5
Hasil Analisis Model PEGR

Kabupaten	2011		2012	
	IGp	Gg	IGp	Gg
Bantaeng	0.39	0.08	0.14	0.08
Barru	0.21	0.09	0.01	0.09
Bone	0.03	0.08	-0.02	0.08
Bulukumba	0.19	0.06	0.11	0.16
Enrekang	-0.01	0.06	0.01	0.09
Gowa	-0.14	0.07	0.06	0.07
Jeneponto	0.04	0.07	0.07	0.08
Luwu	-0.27	0.08	0.23	0.07
Luwu Timur	0.66	0.08	0.07	0.07
Luwu Utara	0.05	-0.05	0.26	0.06
Makassar	0.98	0.07	0.10	0.07
Maros	0.55	0.10	-0.03	0.09
Palopo	0.49	0.10	0.01	0.11
Pangkep	0.03	0.07	0.21	0.07
Parepare	0.52	0.09	0.04	0.08
Pinrang	0.47	0.08	0.02	0.09
Selayar	0.34	0.68	0.02	0.08
Sidrap	0.54	0.09	0.06	0.08
Sinjai	0.01	0.07	0.06	0.07
Soppeng	-0.25	0.07	0.12	0.07
Takalar	-0.04	0.07	0.14	0.07
Tana Toraja	-0.61	0.07	0.15	0.09
Toraja Utara	-0.25	0.08	0.07	0.09
Wajo	0.17	0.09	0.13	0.06
SULSEL	0.17	0.15	0.09	0.14

Kabupaten	2013		2014	
	IGp	Gg	IGp	Gg
Bantaeng	-0.12	0.09	0.27	0.09
Barru	-0.05	0.09	0.02	0.07
Bone	-0.01	0.07	0.20	0.07
Bulukumba	0.10	-0.02	0.20	0.09
Enrekang	0.21	0.07	-0.04	0.08

Gowa	0.05	0.06	0.24	0.06
Jeneponto	-0.11	0.09	0.22	0.07
Luwu	-0.02	0.06	0.31	0.08
Luwu Timur	0.03	0.07	0.10	0.08
Luwu Utara	0.01	1.86	0.20	-1.72
Makassar	0.03	0.07	0.05	0.08
Maros	0.15	0.08	0.12	0.07
Palopo	0.08	0.06	0.21	0.05
Pangkep	0.24	0.08	0.04	0.06
Parepare	0.06	0.09	0.25	0.09
Pinrang	0.05	0.07	0.10	0.06
Selayar	-0.07	0.07	0.14	0.08
Sidrap	-0.01	0.07	0.14	0.08
Sinjai	0.07	0.08	0.10	0.06
Soppeng	0.05	0.07	0.37	0.06
Takalar	-0.11	0.08	0.19	0.09
Tana Toraja	-0.18	0.07	0.24	0.06
Toraja Utara	0.09	0.09	0.22	0.07
Wajo	-0.05	0.07	0.11	0.09
SULSEL	0.15	0.19	0.15	0.09

Sumber : BPS (2016), hasil olah data

Dari keseluruhan periode penelitian, nilai total koefisien pertumbuhan inklusif untuk provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah konsisten mencapai tingkat pertumbuhan yang inklusif, artinya jika dilihat secara umum (keseluruhan), pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan belum inklusif secara sempurna. Hasil ini terkonfirmasi dengan hasil analisis *Social Mobility Curve* pada Tabel 3 di atas. Meskipun demikian, sebagian besar kabupaten/kota memiliki koefisien inklusifitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dengan nilai/tanda positif. Koefisien inklusifitas yang bernilai/bertanda positif namun lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi berarti bahwa penurunan kemiskinan tetap terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, namun hasil pertumbuhan tidak didistribusikan secara merata dan manfaat pertumbuhan ekonomi tetap diterima oleh penduduk yang tidak tergolong miskin. Pada tahun 2011 terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif bertanda positif (tetapi lebih rendah dari indek Gg), yaitu Bone, Jeneponto, Pangkep, Selayar dan Sinjai. Pada tahun 2012 dan 2013 terdapat hampir 50% dari keseluruhan kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif bertanda positif namun tidak tergolong inklusif. Sementara tahun 2014 hanya 3 kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan yang tidak inklusif namun memiliki koefisien bertanda positif, yaitu Barru, Makassar dan Pangkep.

Tabel 5 di atas juga menunjukkan bahwa sepanjang periode pengamatan, terdapat kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif dengan nilai/tanda negatif. Koefisien pertumbuhan dapat bernilai negatif ketika pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh penduduk tidak miskin. Koefisien yang negatif juga berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu menjalankan peranannya dalam menurunkan kemiskinan, bahkan cenderung memperparah kemiskinan yang terjadi. Kabupaten Takalar dan Tana Toraja mengalami kondisi tersebut selama dua tahun, yaitu tahun 2011 dan 2013. Tahun 2011 adalah tahun dimana jumlah kabupaten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif yang bertanda/bernilai negatif terbanyak, hingga 6

kabupetn/kota atau 25%. Sedangkan tahun 2014 adalah tahun terbaik dimana kabupeten/kota yang memiliki koefisien pertumbuhan inklusif bertanda negataif hanya kabupaten Enrekang, itu pun dengan nilai yang tergolong relatif rendah yaitu - 0.05. Sepanjang periode penelitian, nilai negatif yang terbesar terdapat pada kabupaten Tana Toraja dengan capaian - 0.46 pada tahun 2011.

Tabel 6
Kategori Inklusif dan Tidak Inklusif
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011 – 2014

Kabupaten	2011	2012	2013	2014
Bantaeng	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Barru	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Bone	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Bulukumba	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif
Enrekang	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Gowa	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Jeneponto	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Luwu	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Luwu Timur	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Luwu Utara	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Makassar	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif
Maros	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif
Palopo	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif
Pangkep	Tidak Inklusif	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif
Parepare	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Pinrang	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Selayar	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Sidrap	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Sinjai	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Soppeng	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Takalar	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Tana Toraja	Tidak Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Toraja Utara	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
Wajo	Inklusif	Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif
SULSEL	Inklusif	Tidak Inklusif	Tidak Inklusif	Inklusif

Sumber : BPS (2016), hasil olah data

Sebagaimana yang terjadi pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, koefisien inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan secara umum memiliki nilai yang fluktuatif

sepanjang periode pengamatan. Jumlah kabupaten/kota yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan kemiskinan jauh lebih sedikit dibanding kabupaten/kota yang pertumbuhannya tidak inklusif. Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak inklusif dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan koefisien inklusifitas pertumbuhan total provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat di Tabel 5 di atas.

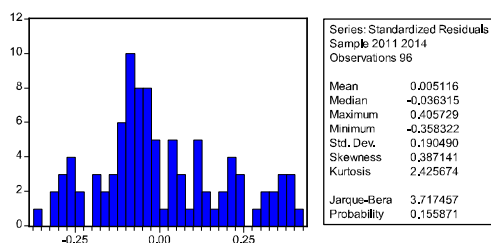
Dengan hasil analisis model *Social Mobilty Curve* dan PEGR di atas, dapat dinyatakan bahwa **hipotesis pertama (H₁) penelitian diterima.**

4.2. Hasil Analisis Data Panel

4.2.1. Hasil Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

4.2.1.1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Residual Test* dan *Histogram Normality Test* melalui aplikasi *Eviews*, diperoleh hasil sebagai berikut :

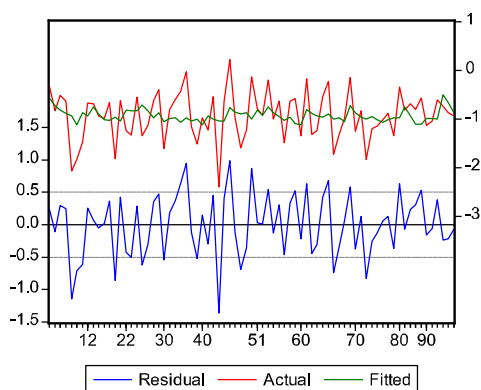


Gambar 3. Hasil Uji Normalitas
Sumber : hasil olah data

Gambar 3 di atas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* (JB) hitung sebesar 3,717. Sementara nilai *Chi Square* dengan melihat jumlah variabel independen yang kita pakai dalam hal ini 5 (lima) variabel independen (df=6) dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%, diperoleh nilai *Chi Square* tabel sebesar 12,590. Hal ini berarti bahwa nilai *Jarque-Bera* (JB) hitung lebih besar dari nilai *Chi Square* (3,717 < 12,590). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal (H₀ diterima).

4.2.1.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal yaitu dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Grafik plot hasil uji dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : hasil olah data

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa plot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Artinya, secara informal data diduga tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Meskipun tentu saja, pembuktian secara informal, sejatinya belum dapat meyakinkan peneliti.

Pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan metode informal karena keterbatasan *Eviews versi 5* yang dimiliki peneliti yang belum memiliki fitur lengkap untuk menguji data dengan metode yang lebih mutakhir. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan bahwa pada data penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, maka dalam model estimasi dilakukan dengan model *Cross-section Weight* pada program *Eviews5*.

4.2.1.3. Uji Autokorelasi

Pada tabel Durbin Watson dengan n (jumlah observasi) = 96, k (jumlah variabel) = 7 dengan *alpha* 5%, diperoleh nilai dL dan dU yaitu nilai dL = 1,5141 dan dU = 1,8265.

Berdasarkan hasil estimasi dengan *Common Effect* (Lampiran 1) diperoleh nilai d hitung (Durbin Watson) pada penelitian ini sebesar 2,0216. Dari nilai d hitung ini didapati bahwa d > dU (2,0216 > 1,8265). Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.2.1.4. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian korelasi antarvariabel independen pada aplikasi *Eviews* untuk melihat adanya masalah atau gejala multikolinearitas, diperoleh tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

	PDRB	PGR	KSH	PDD	BDR	MSK
PDRB	0,721	0,145	-0,067	0,876	-0,395	0,721

PGR	1	0,143	-0,340	0,533	-0,307	1
KSH	0,143	1	0,079	0,055	-0,393	0,143
PDD	-0,340	0,079	1	0,129	0,055	-0,340
BDR	0,533	0,055	0,129	1	-0,346	0,533
MSK	-0,307	-0,393	0,055	-0,346	1	-0,307

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diperoleh hasil bahwa seluruh nilai korelasi antarvariabel independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,95. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas.

4.2.2. Hasil Pengujian Pemilihan Model

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pada analisis regresi data panel terdapat beberapa langkah dalam pengujian pemilihan model. Berikut hasil pengujian dalam beberapa tahapan tersebut.

Pertama, hasil estimasi *Commont Effect* dan *Fixed Effect* sebagaimana tampak pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut:

Tabel 7
Hasil Estimasi *Commont Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.152202	1,193162	0,127562	0,8988
LnPDRB	0,020066	0,058821	0,341127	0,7338
LnPGR	-0,009646	0,024635	-0,391580	0,6963
KSH	-0,000919	0,004684	-0,196148	0,8449
PDD	-0,000951	0,001089	-0,872766	0,3851
LnBDR	0,025215	0,112099	0,224938	0,8225
MSK	-0,089778	0,050014	-1,795033	0,0760

Sumber : hasil olah data

Tabel 8
Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18,99680	15,03596	-1,263424	0,2109
LnPDRB	-0,932163	0,270155	-3,450469	0,0010
LnPGR	-0,035802	0,024727	-1,447902	0,1524
KSH	0,225837	0,207789	1,086859	0,2811
PDD	-0,003528	0,001516	-2,327046	0,0230
LnBDR	1,006303	0,203171	4,952979	0,0000
MSK	-0,864909	0,286442	-3,019487	0,0036

Sumber : hasil olah data

Kedua, hasil uji *Chow* dengan menggunakan *Redundant Fixed Effects Tests* untuk menentukan model yang digunakan apakah *Common Effect* atau *Fixed Effect* sebagaimana tampak pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9
Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,174267	(23,66)	0,0075

Sumber : hasil olah data

Dari Tabel 9 di atas diperoleh nilai *Prob. Cross Section F* sebesar 0,0075 yang lebih kecil dari *alpha* 0,05, sehingga kita menolak hipotesis nol (H_0 ditolak). Maka, berdasarkan hasil uji *Chow* ini, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode *Fixed Effect*.

Ketiga, estimasi kemudian dilanjutkan dengan metode *Random Effect*. Setelah melakukan analisis melalui program *Eviews* diperoleh hasil estimasi *Random Effect* sebagaimana Tabel 10 berikut :

Tabel 10
Hasil Estimasi *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,826562	1,778201	0,464831	0,6432
LnPDRB	0,079207	0,079918	0,991105	0,3243
LnPGR	-0,041038	0,043608	-0,941064	0,3492
KSH	0,003266	0,007807	0,418369	0,6767
PDD	-0,001843	0,001596	-1,154959	0,2512
LnBDR	-0,048199	0,155283	-0,310395	0,7570
MSK	-0,107676	0,076695	-1,403957	0,1638

Sumber : hasil olah data

Keempat, untuk menentukan model yang digunakan apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect* dilakukan Uji *Hausman* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 11
Hasil Uji *Chow*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6,745640	6	0,3450

Sumber : hasil olah data

Dari Tabel 11 di atas diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* sebesar 0,3450 yang lebih besar dari *alpha* 0,05, sehingga kita menerima hipotesis nol (H_0 diterima). Maka, berdasarkan hasil uji *Hausman* ini, model yang terbaik (pemilihan) adalah model dengan metode *Fixed Effect*.

4.2.3. Pembahasan

Setelah melalui pengujian normalitas dan asumsi klasik serta pemilihan model, maka dapat diperoleh estimasi persamaan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect* sebagai berikut:

$$IGP_{pit} = -18,996 - 0,932PDRB - 0,035PGR_{it} + 0,225KSH_{it} - 0,003PDD_{it} + 1,006BDR_{it} - 0,864MSK_{it} + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel di atas, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi

sebesar -0,357, di mana tanda negatif (-) menandakan adanya hubungan negatif, yang berarti jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, maka indeks pertumbuhan inklusif akan turun sebesar 3,57 persen. Hasil ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ravallion (1996), Son dan Kakwani (2003), Todaro (2006), Bourguignon (2004) dan Mankiew (2006) bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi terkadang hanya berasal dari sejumlah golongan masyarakat sehingga manfaat dari pertumbuhan tidak bersifat inklusif yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin parah (meningkat).

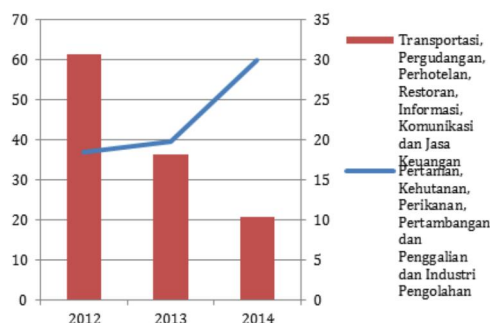
Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada variabel makro-ekonomi, terutama arus penanaman modal dan peningkatan ekspor, memang seringkali tidak memiliki kaitan yang kuat dengan pengentasan penduduk miskin. Kaitan tersebut menjadi semakin lemah, ketika arus penanaman modal tersebut lebih banyak bergerak pada usaha padat modal (misalnya, industri telekomunikasi) dan sektor-sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga keuangan; hotel dan restoran; listrik, air bersih dan gas). Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) ataupun pertumbuhan berkualitas (*the quality of growth*) ataupun pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin (*pro-poor growth*), sebagai sebuah terminologi baru dalam wacana pembangunan dewasa ini, perlu didorong dan diintensifkan di Provinsi Sulawesi Selatan, baik pada tingkatan rencana maupun pada tingkatan implementasi. Konsep ini lebih mementingkan “dampak” ketimbang sekedar angka statistik.

Hasil penelitian ini juga membuktikan hipotesis penelitian (dari sisi pengaruh) bahwa pengangguran akan menjadi penghambat pertumbuhan inklusif. Nilai koefisien regresi variabel pengangguran bertanda negatif (-) sebesar -0,035. Hal ini berarti bahwa jika tingkat pengangguran meningkat, maka indeks pertumbuhan inklusif menurun. Begitupula sebaliknya, jika tingkat pengangguran menurun, maka indeks pertumbuhan inklusif akan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan dari jalur kemiskinan. Secara teori, pengangguran yang meningkat, akan memicu terjadinya kemiskinan karena banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja, sehingga pendapatan per kapita menjadi menurun dan menimbulkan kemiskinan. Jika kemiskinan bertambah, pertumbuhan cenderung tidak inklusif, karena kemiskinan dan inklusif adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Hal ini juga dikonfirmasi dari hasil analisis pada variabel jumlah penduduk miskin yang terbukti berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif.

Meskipun tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pengaruh yang negatif, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal

ini terlihat dari nilai *Prob* (signifikansi) hasil analisis yang bernilai 0.1524 (>0,05).

Dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kabupaten/kota patut mewaspadai terjadinya pergeseran tenaga kerja pada beberapa sektor/lapangan usaha.



Grafik 6. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2014

Sumber : BPS (2016), hasil olah data

Berdasarkan data pada Grafik 6 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada satu sektor usaha (transportasi, perhotelan dan lainnya) yang menurun diikuti oleh pertumbuhan ekonomi pada sektor lainnya (pertanian, kehutanan dan lainnya) yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun pada suatu sektor berdampak pada bertambahnya pengangguran pada sektor tersebut. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang terus naik pada sektor lainnya, justru akan berdampak pada pengurangan pengangguran karena terserapnya tenaga kerja.

Peningkatan jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan di satu sektor usaha justru diikuti oleh pengurangan pengangguran dan kemiskinan di sektor usaha yang lain karena terjadinya pergeseran pendapatan masyarakat antarsektor usaha tersebut. Perubahan struktur ekonomi pada berbagai sektor usaha yang mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan sektoral tersebut akan mengakibatkan terjadinya pergeseran daya beli dari pemilik faktor produksi yang sektor usahanya mengecil perannya ke pemilik faktor produksi yang tengah berkembang. Pengaruh ini menandakan bahwa di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha, yaitu dari sektor usaha yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga keuangan, telekomunikasi, hotel dan restoran) ke sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan). Sehingga nampaknya ketika di satu sisi yaitu sektor usaha dengan elastisitas penyerapan

rendah terdapat peningkatan pengangguran yang berakibat pada kemiskinan, di sisi lain yaitu di sektor usaha yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi justru mengalami penurunan tingkat pengangguran, sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat di sektor-sektor tersebut yang berujung pada peningkatan pendapatan (lebih inklusif). Hal ini dapat dipahami karena sektor usaha di bidang pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan masih menjadi primadona di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu menyerap lebih dari 50% dari jumlah angkatan kerja.

Indeks Kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Artinya, ketika indeks kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat, maka indeks pertumbuhan inklusif juga akan meningkat. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk kewajiban pemerintah kepada masyarakat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk Program Pelayanan Kesehatan Gratis. Pelayanan Kesehatan Gratis yang dicanangkan sejak 1 Juli 2008 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota. Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan kesehatan di daerah ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sektor kesehatan dalam APBD Provinsi Sulsel yang terus meningkat sejak tahun 2012.

Tabel 12
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014

Fasilitas Kesehatan	Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan			
	2011	2012	2013	2014
Rumah Sakit	86	96	84	88
Puskesmas	423	431	440	446
Puskesmas Keliling	427	421	445	408
Klinik/Balai Kesehatan	0	87	236	143
Sulawesi Selatan	11354	11539	12136	12141

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat (2015)

Tabel 13
Jumlah Penerima Program Kesehatan Gratis
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 (persen)

	2012	2013	2014
Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Miskin	45,92	61,75	66,26

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat (2014)

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa pendidikan yang diprosi dari angka partisipasi murni sekolah masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SLTP dan SLTA) pada kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Artinya, ketika angka partisipasi sekolah meningkat, maka indeks pertumbuhan inklusif

justru menurun. Berdasarkan Data Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan, tercatat bahwa Angkatan Kerja yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas dimana sebagian besarnya berasal dari lulusan pendidikan hingga tingkat menengah atas pada tahun tiga tahun terakhir relatif bertambah. Namun sayangnya peningkatan ini justru diikuti dengan peningkatan rasio atau tingkat pengangguran terbuka (Lihat Tabel 12). Artinya, banyak angkatan kerja yang telah menempuh pendidikan hingga tingkat pendidikan menengah dan telah menjadi angkatan kerja, ternyata tidak mampu terserap sebagai tenaga kerja di lapangan usaha. Akibatnya, angka tingkat pengangguran terbuka meningkat. Pengangguran yang meningkat tentunya akan menghambat inklusifitas pertumbuhan karena bertambahnya jumlah penduduk yang terancam dengan kemiskinan.

Dalam perspektif lainnya, pengaruh negatif ini juga dapat berarti bahwa jasa atau akses pendidikan yang memadai belum banyak dirasakan oleh masyarakat miskin. Permasalahan terkait validasi dan verifikasi data masyarakat miskin masih kerap terjadi sehingga masih banyak masyarakat non-miskin yang menerima bantuan pendidikan yang seharusnya hanya ditujukan oleh masyarakat miskin. Masfiatun (2014) dalam kajiannya menyebutkan bahwa pada fenomena seperti terdapat dugaan bahwa kegiatan jasa tersebut (pendidikan) terjadi "fusibility" sehingga *benefit* dari fasilitas pemerintah tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga yang berpenghasilan tinggi, sehingga pada gilirannya memperburuk distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil temuan Criswardani (2005), Todaro (2006), Hermanto dan Dwi (2007). Hal ini dapat dipahami karena objek penelitian-penelitian tersebut mengambil *scope* yang lebih luas yaitu nasional. Sementara penelitian ini mengambil objek penelitian pada tingkat regional (kabupaten/kota) yang bisa jadi memiliki karakteristik yang berbeda.

Tabel 14
Angka Partisipasi Sekolah, Angkatan Kerja dan
Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2015 (Juta Jiwa)

Unsur	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Murni Sekolah (SLTA)	53.790	59.100	59.470
Angkatan Kerja	3.468	3.716	3.706
Angkatan Kerja yang Menganggur Tingkat Pengangguran Terbuka	0.177	0.189	0.221
	5.100	5.100	5.950

Sumber : BPS (2015), data diolah.

Selanjutnya, belanja daerah sebagai bentuk peran alokasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif. Artinya, ketika pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pada beberapa sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, sosial dan lainnya, maka indeks pertumbuhan inklusif akan semakin meningkat. Hal ini dipahami bahwa pengeluaran atau belanja pemerintah daerah selain dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, juga dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Hasil ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hasibuan (2005) dan Alawi (2006).

Tabel 15
Jumlah Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)

	2011	2012	2013	2014
Belanja Pegawai	627.707	736.276	791.000	1.020.475
Belanja Bunga	150	50	46.250	16.151
Belanja Hibah	87.495	1.232.931	1.224.962	1.234.945
Belanja Bantuan Sosial	22.099	5.000	2.000	-

Sumber : DJPK, 2011-2014

4.2.4. Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.4.1. Hasil Uji Statistik t (Secara Parsial).

Berdasarkan hasil uji *t-statistic* estimasi model *Fixed Effect* pada Tabel 16 di bawah, diperoleh nilai *Prob (t-statistic)* masing-masing variabel bebas yaitu PDRB, PGR, KSH, PDD, BDR dan MSK sebesar **0,001 (< 0,05)**, **0,152 (> 0,05)**, **0,281 (> 0,05)**, **0,023 (< 0,05)**, **0,000 (< 0,05)** dan **0,003 (< 0,05)**. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial :

- Variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh **negatif** yang **signifikan** terhadap variabel Pertumbuhan Inklusif (IGP). Dengan pembuktian ini, maka **H₂ penelitian ini diterima**;
- Variabel pengangguran (PGR) memiliki pengaruh **negatif** yang **tidak signifikan** terhadap variabel Pertumbuhan Inklusif (IGP). Dengan pembuktian ini, maka **H₃ penelitian ini ditolak**;
- Variabel kesehatan (KSH) memiliki pengaruh **positif** yang **tidak signifikan** terhadap variabel Pertumbuhan Inklusif (IGP). Dengan pembuktian ini, maka **H₄ penelitian ini ditolak**;
- Variabel pendidikan (PDD) memiliki pengaruh **negatif** yang **signifikan** terhadap variabel Pertumbuhan Inklusif (IGP). Dengan pembuktian ini, maka **H₅ penelitian ini ditolak**;
- Variabel belanja daerah (BDR) memiliki pengaruh **positif** yang **signifikan** terhadap variabel

Pertumbuhan Inklusif (IGP). Dengan pembuktian ini, maka **H₆ penelitian ini diterima**;

- Variabel jumlah penduduk miskin (MSK) memiliki pengaruh **negatif** yang **signifikan** terhadap variabel Pertumbuhan Inklusif (IGP). Dengan pembuktian ini, maka **H₇ penelitian ini diterima**.

Tabel 16
Hasil Uji Statistik t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-1.263424	0.2109
LnPDRB	-3.450469	0.0010
LnPGR	-1.447902	0.1524
KSH	1.086859	0.2811
PDD	-2.327046	0.0230
LnBDR	4.952979	0.0000
MSK	-3.019487	0.0036

Sumber : hasil olah data

4.2.4.2. Hasil Uji Statistik F (Secara Simultan).

Berdasarkan hasil uji *F-statistic* estimasi model *Fixed Effect* pada Tabel 17 di bawah, diperoleh nilai *Prob (F-statistic)* sebesar **0,002** yang lebih kecil dari *alpha* 0,05. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Dengan pembuktian ini, maka **H₈ penelitian ini diterima**.

Tabel 17

Hasil Uji F

Weighted Statistics	F-statistic	Prob (F-statistic)
	2,343912	0,002218

Sumber : hasil olah data

Secara ringkas rekapitulasi hasil uji hipotesis penelitian dapat digambarkan sebagaimana Tabel 18 berikut :

Tabel 18
Rekapitulasi Hasil Uji Data Penelitian

Variabel	Uji	Tanda	Signifikansi	Hipotesis
LnPDRB	<i>t-statistic</i>	-	Signifikan	Diterima
LnPGR		-	Tidak Signifikan	Ditolak
KSH		+	Tidak Signifikan	Ditolak
PDD		-	Tidak Signifikan	Ditolak
LnBDR		+	Signifikan	Diterima
MSK	<i>F-statistic</i>	-	Signifikan	Diterima
Simultan		+	Signifikan	Diterima

Sumber : hasil olah data

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Fenomena inklusifitas pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Melalui metode *Social Mobility Curve*, pertumbuhan secara total (*agrregat*) di Provinsi Sulawesi Selatan belum mencapai pertumbuhan inklusif yang sempurna. Nilai *Equity Income Index* (ω) sebesar 0.59 pada tahun 2011 dan 0.67 pada tahun 2015 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum banyak berpihak kepada masyarakat miskin sebagai pertumbuhan yang *pro-poor*.
- b. Melalui metode *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR), dari keseluruhan periode penelitian, nilai total koefisien pertumbuhan inklusif untuk Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang inklusif. Artinya, jika dilihat secara umum (keseluruhan), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan belum inklusif. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan capaian tingkat kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota memiliki koefisien inklusifitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dengan nilai/tanda positif. Koefisien inklusifitas yang bernilai/bertanda positif namun lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi berarti bahwa penurunan kemiskinan tetap terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, namun hasil pertumbuhan tidak didistribusikan secara merata dan manfaat pertumbuhan ekonomi tetap diterima oleh penduduk yang tidak tergolong miskin.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa, koefisien inklusifitas pertumbuhan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menurunkan kemiskinan secara umum memiliki nilai yang fluktuatif sepanjang periode pengamatan. Jumlah kabupaten/kota yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan kemiskinan jauh lebih sedikit dibanding kabupaten/kota yang pertumbuhannya tidak inklusif. Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak inklusif dalam menurunkan kemiskinan.

2. Pertumbuhan inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDRB kabupaten/kota terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif;
 - b. Pengangguran yang diproksikan oleh jumlah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang tidak bekerja dan menjadi

pengangguran terbukti memiliki pengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif;

- c. Kesehatan yang diproksikan oleh nilai Indeks Kesehatan pada kabupaten/kota terbukti memiliki pengaruh positif terhadap indeks pertumbuhan inklusif;
- d. Pendidikan yang diproksikan oleh partisipasi murni sekolah masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SLTP dan SLTA) pada kabupaten/kota terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif;
- e. Belanja Daerah sebagai bentuk peran alokasi pemerintah kabupaten/kota terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif;
- f. Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota menjadi penghambat inklusifitas pertumbuhan. Hal ini terlihat dari pengaruhnya yang negatif dan signifikan terhadap indeks pertumbuhan inklusif.

6. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Implikasi kebijakan yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

1. Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung berjalan dengan tidak inklusif, maka hendaknya pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih fokus terhadap pemerataan hasil-hasil pembangunan dan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut, tidak dengan sekedar mengejar pencapaian pertumbuhan setinggi-tingginya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat program pembangunan yang langsung ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Di antara program yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan alokasi belanja daerah yang terukur dan tepat sasaran;
2. Pemerintah kabupaten/kota mesti melakukan peninjauan dan pengukuran (verifikasi) yang baik terhadap data masyarakat miskin di daerah masing-masing. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya program pelayanan masyarakat yang menjadikan data tersebut sebagai acuan atau basis data, seperti Bantuan Pendidikan Siswa Miskin dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, R. 2004. *Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating the Growth Elasticity of*

- Poverty. World Development Vol. 32 No. 12. The World Bank. Washington DC.
- Agussalim. (2012). *Memaknai Angka Kemiskinan Sulawesi Selatan*. _____
- Alawi, N. 2006. *Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2002-2004*
- Ali, Ifzal dan Hyun Hwa Son. 2007. *Measuring Inclusive Growth*. Asian Development Review Vol. 24, No. 1, pp. 11-31. Manila: ADB.
- Anand, Rahul, Saurabh Mishra, and Shanaka J. Peiris. (2013). *Inclusive Growth: Measurement and Determinant*. IMF Working Paper, WP/13/135.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Asian Development Bank (ADB). 2011. *Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for Inclusive Growth Indicators, Special Supplement*. Manila: ADB.
- Asian Development Bank (ADB). 2010. *Key Indicators for Asia and the Pacific*. Asian Development Bank : Mandaluyong City, Philippines
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSESNAS) Tahun 2013, 2014 dan 2015
- Bourguignon, F. 2004. *Poverty-Growth-Inequality Triangle*, Paper was presented at the Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, on February 4, 2004.
- Chriswardani, S. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. _____
- Damodar, Gujarati and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 2016. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2010-2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghazali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habito, Cielito F. 2009. *Patterns of Inclusive Growth in Developing Asia: Insights from an Enhanced Growth-Poverty Elasticity Analysis*. Asian Development Bank Institute (ADBI) working paper series No. 145, Tokyo
- Hasan dan Quibria. 2002. *Poverty and Patterns of Growth*. ERD Working Paper No.18. Economic and Research Department. Asian Development Bank.
- Hasibuan, M. S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermanto dan Dwi. 2007. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Paper Ekonomi, Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016. http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/data-center/index.php?page=indeks_gini
- Ianchovichina, Elena dan Sussana Lundstrom. 2009. *Inclusive Growth Analytics Framework and Application*. Policy Research Working Paper 4851, The World Bank Economic Policy and Debt Department Economic Policy Division.
- Klasen, Stephen. 2010. *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. ADB Sustainable Development Working Paper Series.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mankiw, N.G. 2006. *Macroeconomics. Fifth Edition*. Worth Publisher, New York. R. Nurkse, 1953, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford Basis Blackwell.
- Manurung, J. J. dkk. (2005). *Ekonometrika*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Elex Media Computindo.
- Min Tang. 2008. *Inclusive Growth and the New Phase of Poverty Reduction in the People's Republic of China*. Asian Development Review, vol. 25, nos. 1 and 2, pp. 81-99.
- Myrdal, G. 2000. *Obyektivitas Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Octaviani, D. 2001. *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*. Media Ekonomi, Vol. 7, No. 8, Hal. 100-118.
- Ravallion, M & B. Bidani. 1996. *How Robust is Poverty Profile?*, World Bank Economic Review, Vol 8, pp 75-102.
- Rusastra, I W. and Erwidodo. 1998. *Growth, equity and environmental aspect of agricultural development in Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi 6(1): 32-41.
- Sholihah, Dyah Hapsari Amalina. 2014. *Pertumbuhan Inklusif : Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia*. Sekolah Pasca Sarjana : Institut Pertanian Bogor
- Siregar dan Wahyuniarti. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan faktor lain terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1998-2006*
- Son dan Kakwani. 2003. *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies*. The Pakistan Development Review, 42: 4 Part 1 pp 417-444.
- Sukirno, S. 2004. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanarayana, M.H. 2008. *Inclusive Growth: What is so exclusive about it?*. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
- Todayo, M. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keempat Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- United Nations (UN). 2015. *Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2015: Making Growth More Inclusive for Sustainable Development*. Bangkok: United Nations Publication.

Winarno, W. W. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN Yogyakarta.

Lampiran 1

Hasil Estimasi *Common Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LnPDRB	0.020066	0.058821	0.341127	0.7338
LnPGR	-0.009646	0.024635	-0.391580	0.6963
KSH	-0.000919	0.004684	-0.196148	0.8449
PDD	-0.000951	0.001089	-0.872766	0.3851
LnBDR	0.025215	0.112099	0.224938	0.8225
MSK	-0.089778	0.050014	-1.795033	0.0760
C	0.152202	1.193162	0.127562	0.8988
<i>R-squared</i>	0.064581	<i>Mean dependent var</i>		0.135785
<i>Adjusted R-squared</i>	0.001519	<i>S.D. dependent var</i>		0.202135
<i>S.E. of regression</i>	0.196878	<i>Sum squared resid</i>		3.449724
<i>F-statistic</i>	1.024087	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.034894
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.415007			

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LnPDRB	-0.932163	0.270155	-3.450469	0.0010
LnPGR	-0.035802	0.024727	-1.447902	0.1524
KSH	0.225837	0.207789	1.086859	0.2811
PDD	-0.003528	0.001516	-2.327046	0.0230
LnBDR	1.006303	0.203171	4.952979	0.0000
MSK	-0.864909	0.286442	-3.019487	0.0036
C	-18.99680	15.03596	-1.263424	0.2109
<i>R-squared</i>	0.507365	<i>Mean dependent var</i>		0.168378
<i>Adjusted R-squared</i>	0.290904	<i>S.D. dependent var</i>		0.251709
<i>S.E. of regression</i>	0.200610	<i>Sum squared resid</i>		2.656120
<i>F-statistic</i>	2.343912	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.428106
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.002218			

Hasil Estimasi *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LnPDRB	0.079207	0.079918	0.991105	0.3243
LnPGR	-0.041038	0.043608	-0.941064	0.3492
KSH	0.003266	0.007807	0.418369	0.6767
PDD	-0.001843	0.001596	-1.154959	0.2512
LnBDR	-0.048199	0.155283	-0.310395	0.7570
MSK	-0.107676	0.076695	-1.403957	0.1638
C	0.826562	1.778201	0.464831	0.6432
<i>R-squared</i>	0.093913	<i>Mean dependent var</i>		0.110729
<i>Adjusted R-squared</i>	0.032829	<i>S.D. dependent var</i>		0.204122
<i>S.E. of regression</i>	0.200743	<i>Sum squared resid</i>		3.586517
<i>F-statistic</i>	1.537433	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.021616
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.175194			